

EKSPLORASI MAKNA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGANGGARAN (Sebuah Studi Fenomenologi)

Sulton Arfiansyah

Magister Akuntansi Universitas Brawijaya
sultonsyah@gmail.com

Abstract: *Meaning Exploration of Citizen Participation in Budgeting, a Phenomenology Study. This study is aimed at understanding the actors of Public Empowerment Program of Kediri government, particularly at "Harmony" Sub-District, regarding the citizen participation in budgeting. The research method of the study is a transcendental phenomenology. The results of this study reveal a number of phenomena, first, the program's actors understand the citizen's participation on budget planning as a trust. Second, in implementing the budget, the citizen's participation is interpreted as a job. Finally, the citizen participation in budget supervision is interpreted as a guarantee. Hence the conclusion drawn is the government programs must be implemented through a process of interaction between the government and the public on the basis of trust by working together and of guarantee that the programs can run well and successfully.*

Keywords: *Meaning, Citizen Participation, Budgeting.*

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi topik hangat berbagai negara, terutama pada satu dekade terakhir. Beberapa negara maupun daerah tersebut sedang berusaha untuk memperoleh jalan keluar terutama fiskal, sebagai solusi penyerapan anggaran, peningkatan pelayanan, dan pembangunan (Ebdon dan Franklin, 2006). Di Indonesia, setelah muncul amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran menjadi sebuah keharusan sebagai salah satu komponen pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dalam konteks penganggaran pada akuntansi sektor publik, partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan sebuah proses demokrasi dalam

pembuatan kebijakan yang mana pemerintah mengundang warga untuk dapat memberikan masukan selama proses penganggaran, dan memungkinkan pengaruh mereka dalam pengalokasian anggaran (Zhang, 2009). Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai adanya kontribusi masyarakat dalam lahirnya sebuah kebijakan publik (Sopanah, 2014). Terkait keterlibatan masyarakat dalam penganggaran, hal ini harus dilakukan disetiap tahapan dalam siklus penganggaran, yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah (Sisk, 2002), karena dapat meningkatkan tanggungjawab pemerintah melalui keterlibatan

mereka (Ljungholm, 2015), memperkuat pengawasan anggaran (Sopannah, 2005), juga sebagai bentuk penyampaian aspirasi melalui mekanisme yang tepat. Hal ini menjadi alasan tepat bagi masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam menentukan solusi terbaik bagi keduanya. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan yang dibuat dapat lebih realistis (Ljungholm, 2015). Callahan (2002) dan Ebdon (2002) menegaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat demokratisasi. Keputusan dan kebijakan pemerintah harus mendapatkan dukungan warga agar terlaksana. Adanya keterlibatan masyarakat dalam penganggaran menyebabkan diketahuinya usulan dan keinginan masyarakat, serta dapat dijadikan acuan dalam peningkatan *trust* dari masyarakat.

Penelitian terkait partisipasi masyarakat diantaranya mulai dilakukan oleh Ebdon (2002), yang mana telah mengeksplorasi dampak dari partisipasi masyarakat dalam anggaran di beberapa kota di Nebraska. Ebdon menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keputusan anggaran pada suatu daerah. Ebdon dan Franklin (2004) melanjutkan penelitiannya tentang hal ini, yang mana rata-rata kota pada waktu itu masih mencari sebuah mekanisme yang tepat untuk partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Ebdon dan Franklin (2006) menindaklanjuti temuannya dan mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) elemen kunci yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penganggaran, diantaranya adalah kondisi lingkungan daerah, desain proses, mekanisme, serta capaian target dan hasil yang telah dikeluarkan.

Becket (2002) juga menekankan akan pentingnya partisipasi masyarakat, sehingga teknik dan strategi dalam menjaring aspirasi, kontribusi dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang menentukan keberhasilan serta dapat memperkuat kontribusi masyarakat dalam keputusan anggaran serta kebijakan sebuah daerah. Marlowe dan Portilo (2006) kemudian menekankan pentingnya faktor demografi dan kelembagaan dalam mempengaruhi persepsi pemerintah daerah dalam keterlibatan warga. Herian (2011) juga memberikan sumbangsih bahwa variabel politik, ekonomi dan kelembagaan memberikan pengaruh dominan terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam sebuah daerah. Dengan adanya otonomi, sebuah daerah

tertentu dapat menggunakan berbagai metode dan aturan main yang mengatur tentang mekanisme keterlibatan warganya dalam penganggaran. Terlebih program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri ini awalnya adalah sebuah kontrak politik antara Calon Walikota dengan masyarakat, sehingga setelah menjadi Kepala Daerah, program ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab beliau dan menjadi program unggulan.

Sopannah dan Wahyudi (2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran waktu itu masih sangat rendah sehingga menyebabkan terjadinya distorsi dalam penyusunan APBD. Kemudian Sopannah (2008; 2009) menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada waktu itu mulai munculnya strategi Kepala Daerah untuk mengadakan kontrak kerja atau janji politik terhadap masyarakat. Hal ini yang kemudian berdampak signifikan terhadap adanya peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2014 dengan tema partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran daerah yang berbasis kearifan lokal, penelitian Sopannah (2014) dilakukan pada masyarakat suku Tengger Bromo di Jawa Timur. Sampai saat ini mereka melestarikan adat-istiadat juga terkait partisipasi masyarakat. Musyawarah dalam Proses Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara formal dilakukan, namun tetap melakukan rembung warga suku tengger yakni sebuah musyawarah dengan tujuan yang hampir sama, dihadiri oleh hampir seluruh masyarakat Tengger. Hal tersebut dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan selama satu tahun, sekaligus forum untuk menyampaikan dan menerima usulan pembangunan di tahun berikutnya.

Seorang Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya secara formal kepada DPRD, berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Kepala Daerah kemudian juga menyampaikan LKPJ tersebut secara langsung kepada masyarakat di alun-alun kota. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Kepala Daerah, namun juga dilakukan oleh Petinggi Suku. Fenomena ini merupakan bentuk “kejujuran” yang telah dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya. Inilah wujud pelestarian mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penganggaran dan pembangunan pada masyarakat suku Tengger.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapatnya sebuah mekanisme baru, sebuah strategi baru yang diimplementasikan pada partisipasi masyarakat dalam penganggaran di sebuah daerah. Budaya maupun adat istiadat yang mana di sebagian daerah sangat baik dan masih dilestarikan, seperti praktik partisipasi masyarakat pada suku tengger (Sopannah, 2013), namun masih belum tertuang dalam sebuah aturan. Sedangkan praktik partisipasi masyarakat dalam penganggaran ini sudah tertuang dalam sebuah aturan daerah, yang semula sebagai kontrak kerja calon Kepala Daerah. Petunjuk teknis yang mengatur mekanisme ini terdapat pada Peraturan Walikota Kediri nomor 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, yang biasa disebut Prodamas.

Konsep program pemberdayaan masyarakat yakni “50 (lima puluh) juta per RT per tahun” sebagai program unggulan ini disambut baik oleh masyarakat kota Kediri. Sebuah program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat pada level kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan kemasyarakatan.

Prodamas ini tentunya juga merupakan implementasi dari mekanisme anggaran partisipatif dari masyarakat di kota Kediri, sejalan dengan yang disampaikan oleh Ebdon (2006); Callahan (2011), serta sebagai bentuk inovasi dan strategi yang dapat digunakan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam keputusan anggaran, keuangan dan kebijakan (Becket, 2002). Prodamas juga menjadi wujud dari “perbaikan” atas kontrak kerja antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang disarankan oleh Schick (2011).

Penelitian ini mencoba untuk mencari makna mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Pencarian makna ini tertuju pada para pelaksana program, dan berfokus pada Kelurahan dengan predikat “Terbaik” dalam pelaksanaan program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ini. Makna yang dicari tentang partisipasi masyarakat dalam penganggaran ini berdasar pengalaman para aktor di lapangan, mempersilahkan aktor tersebut mengemukakan pemaknaannya, persepsinya, dengan kesadaran murni tanpa sentuhan opini dari peneliti. Pelaksanaan

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Sebuah studi fenomenologis akan menggambarkan suatu makna secara mendalam, diperoleh dari beberapa individu yang mempunyai pengalaman hidup terkait sebuah konsep tertentu dengan tujuan mereduksi apa yang dialami oleh individu tersebut kedalam sebuah esensi yang bersifat universal (Creswell, 2014:105). Tentang pengertian fenomenologi, Kamayanti (2016:150) menegaskan bahwa, tidak cukup dalam studi fenomenologi untuk hanya mencari sebuah fenomena, seperti yang terkandung dalam kata “fenomeno” namun lebih dalam lagi, yakni memahami sebuah asumsi seseorang terhadap realitas yang dialaminya. Penelitian akuntansi yang menggunakan fenomenologi adalah sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemahaman dari individual akuntan tersebut terhadap praktik tertentu yang dialaminya, tidak dapat digunakan dalam sebuah organisasi atau sistem tertentu.

Fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan makna implisit dari sebuah pengalaman seseorang, kemudian ditemukan sebuah esensi yang tentunya tidak dapat ditemukan dengan pengalaman biasa (Edie, 1962). Dengan kata lain secara sederhana fenomenologi merupakan titik temu antara sebuah kejadian tertentu dengan kesadaran murni dari pelakunya (Yanuarisa *et al.*, 2012). Intuisi dan refleksi secara subjektif dijadikan alat dalam penelitian fenomenologi. Hal tersebut diperoleh dari hasil analisis intensional atas pengalaman dari aktor, melalui tahapan proses “wawancara” tepatnya adalah *epoche*, dengan memperhatikan dan menyertakan makna yang tersirat dibalik apa yang kasat mata atau terlihat.

Studi fenomenologi dipandang tepat pada penelitian ini karena digunakan untuk mendapatkan pemahaman akan sebuah makna yang mendalam atas sesuatu berdasar dari persepsi aktor atas sebuah fenomena yang dialaminya. Pada penelitian ini, setelah ditemukan sebuah makna kemudian merefleksikan esensi atas praktik partisipasi masyarakat dalam penganggaran di Kota Kediri, melalui kacamata para pelaksananya sebagai narasumber dalam penelitian ini. Cara pandang

tersebut memang bersumber dari perilaku manusia sebagaimana yang dikatakan, dilakukan dan merupakan pengalaman-pengalaman subjektif seseorang beserta interpretasinya (Moleong, 2014). Pengalaman hidup yang dialami oleh para aktor ini, kemudian dijadikan data dasar bagi peneliti untuk memahami makna partisipasi masyarakat dalam penganggaran.

Jenis fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi transendental. Penggunaan fenomenologi transendental ini dikarenakan adanya ketertarikan terhadap penemuan makna secara murni serta sebuah hakikat dari pengalaman. Melalui fenomenologi transendental ini, peneliti tidak melakukan “campur tangan” terhadap sebuah persepsi yang diungkapkan para subjek, sehingga murni dari sumbernya. Peneliti juga menahan diri dari adanya pre konsepsi atas sebuah makna yang akan dicari. Burrell dan Morgan (1979) menjelaskan bahwa sumber dari semua makna adalah sebuah kesadaran murni atau transendental. Kesadaran ini lebih dominan bertitik tolak pada pengalaman yang bersifat religius (Bevans, 2002). Tentang religiusitas ini dipertegas oleh Kamayanti (2016:151), yakni bagaimana seseorang dapat “menemukan Tuhan” dalam setiap apa yang dialaminya. Sebuah pengalaman tentang kebenaran *ilahiyyah*, yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia kepada Tuhannya.

Beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *noema*, *noesis*, *epoche* (*bracketing*), *intentional analysis*, dan *eidetic reduction* (Theodoru, 2015; Kamayanti, 2016:157). Dengan teknik dan urutan tertentu sesuai tahapan yang dijelaskan dalam teknik analisis data. *Noema* dapat dikatakan sebuah jawaban permukaan, jawaban awal yang diberikan oleh informan. *Noema* ini dapat berupa jawaban normatif, idealis, atau sesuai dengan aturan yang ada, belum pada jawaban yang sebenarnya. *Epoche* adalah peneliti harus secara jeli dapat menangkap kata kunci untuk dilakukan *bracketing*. Peneliti terfokus pada kata yang nantinya ditindaklanjuti dengan pendalaman, penggalian makna, pengembangan kreatif mungkin untuk mendapatkan sebuah *noesis*. Jadi dapat dikatakan *noesis* adalah jawaban akhir dari subjek untuk sebuah penggalian makna yang ingin diketahui. Setelah itu dilakukan sebuah analisis

mendalam, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan sebuah hasil, yakni sebuah kondensasi dari seluruh proses pemaknaan, atau sebuah ide yang menjadi dasar dari kesadaran murni tersebut, dan inilah yang disebut *eidetic reduction*.

Noema dalam penelitian ini adalah “partisipasi” dari masyarakat dalam penganggaran pada program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri. Sedangkan *noesis* dalam penelitian ini adalah cara pandang atau persepsi para pelaksana program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri terhadap *noema* yaitu partisipasi masyarakat. Proses reduksi yang terjadi yaitu berbagai macam tindakan penyaringan yang dilakukan oleh pelaksana program ini, antara tampilan partisipasi masyarakat yang ada dengan hakikat atau makna partisipasi masyarakat tersebut bagi informan.

Situs penelitian mengerucut pada salah satu kelurahan di kota Kediri, yakni kelurahan “Harmoni”, yang mendapatkan predikat terbaik dari Pemerintah Kota Kediri berdasar pelaksanaan program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015. Informan pada penelitian ini adalah para pelaksana program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan “Harmoni” di kota Kediri, sebanyak 6 (enam) orang. Seperti yang ditegaskan oleh Kamayanti (2016:151) bahwa, agar dapat mengupas secara mendalam terhadap apa yang dialami informan, maka tidak mungkin untuk mengambil lebih dari 10 (sepuluh) informan. Penunjukan perwakilan narasumber oleh peneliti diperkuat dengan adanya rekomendasi dan sudah mendapat persetujuan dari pihak kelurahan “Harmoni”, mereka adalah: Bapak Yono (Ketua RT), Bapak Tanto (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan), Bapak Zen (PPTK), Bapak Purwanto (Ketua RT), Ibu Yusa (Sekretaris Kelurahan) dan Bapak Budi (Ketua RT). Informan tambahan pada penelitian ini adalah Bapak Kepala Kelurahan, 2 (dua) orang dari SKPD terkait, yakni Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Kediri.

Tabel Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental digunakan untuk mempermudah pemetaan terhadap *noema*, *noesis*, *intentional analysis* dan *eidetic reduction*. Kemudian kapanakah seorang peneliti dikatakan mendapatkan

kesadaran terdalam dari informan? Maka jawabnya adalah ketika informan tidak memberikan sebuah jawaban yang tidak dapat dilakukan *bracketing* baru oleh peneliti, yang nantinya dapat dikupas lagi lebih dalam. Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan oleh peneliti, dengan alur tanya jawab yang dilalui.

daerah. Hal ini terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti perencanaan penganggaran di kota Kediri ini sangat tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kepastian pelaksanaan dan pencairan anggaran dari hasil pemetaan kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaan rebug warga, masyarakat saling memberikan usul-

Tabel 1 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>	<i>Intentional Analysis</i>	<i>Eidetic Reduction</i>
Partisipasi masyarakat dalam penganggaran pertanyaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan penganggaran	<i>Bracketing</i> kemudian dilanjutkan ke <i>noesis</i>	Penggalian <i>epoche</i> sampai tidak ditemukan <i>bracketing</i> baru	Analisis keseluruhan proses dengan tanpa sentuhan pendapat dari peneliti	Hasil dari seluruh proses pemaknaan, Sebuah luncuran ide yang melandasi kesadaran murni tersebut

Sumber : Kamayanti (2016:157) dimodifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan sebagai Makna Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran

Proses perencanaan penganggaran terkait Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri ini berbeda dengan Musyawarah Perencanaan Penganggaran (Musrenbang) yang selama ini berjalan. Warga pengurus RT bermusyawarah melalui “rebug warga” untuk menentukan apa saja kebutuhan masyarakat setempat yang akan diwujudkan dengan dana Prodama pada tahun anggaran berikutnya. Usulan perencanaan dan ilustrasi sebagai hasil dari musyawarah tersebut kemudian diajukan ke pemkot kemudian diterbitkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA ini juga harus dipublikasikan ke warga. Praktiknya adalah disediakan di halaman depan di Kantor Kelurahan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disarankan oleh Petrie dan Shields (2010) dengan tambahan beberapa cara agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi anggaran pemerintah khususnya di

an, dan memusyawarahkannya sesuai dengan urutan prioritas. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ketua Tim Perencana.

Setelah dilakukan penggalian makna pada Subjek pertama, ditemukan beberapa *bracketing* yang nantinya ditemukan *noesis*. Beberapa *bracketing* tersebut adalah “musyawarah”, kemudian “penyampaian usulan”. Bapak RT mencontohkan beberapa usulan warga, dimulai dari infrastruktur, perbaikan jalan, penerangan jalan, drainase sampai pada pembelian barang untuk inventaris. Beliau kemudian menjelaskan tujuan pada intinya adalah untuk membuat masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman tinggal pada lingkungan mereka juga menjadi lebih mandiri khususnya secara ekonomi. Penjelasan ini menjadi *noesis* dari beliau terkait makna partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran. Beliau Bapak Yonno secara sadar memaknai partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran adalah sebuah usaha agar masyarakat merasa aman dan nyaman berada di lingkungan mereka, mempunyai peningkatan kemandirian serta kesejahteraan hidup.

Setelah mendapati makna pertama dari informan pertama yakni Bapak Yono sebagai RT, selanjutnya adalah penggalian makna dari sisi perangkat kelurahan, yakni Bapak Tanto sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan “Harmoni”. Beliau secara struktur sebagai Ketua tim perencana program ini. Tentunya mempunyai persepsi yang berbeda berdasar pengalaman yang dia alami selama menjadi Ketua Tim Perencana.

Beberapa *bracketing* pada pernyataan Bapak Tanto adalah “pembahasan” kemudian “diskusi”. Bapak Tanto menjelaskan bahwa di dalam kegiatan rembug warga, mereka melakukan diskusi tentang apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini sepenuhnya dihandle oleh Ketua RT. Diskusi tersebut dilakukan untuk “mencari titik temu” yang mana dapat diperoleh melalui “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Noesis dari pernyataan di atas adalah “bermusyawarah untuk mencapai mufakat”.

Rembug warga ini dilaksanakan bisa jadi ketika penentuan prioritas dengan beberapa pilihan, kemudian ada usulan yang pada awalnya kurang mendapat persetujuan serta kurang memperoleh suara yang banyak, namun usulan tersebut bisa menjadi agenda yang paling didahulukan setelah kata mufakat dicapai. Penerapan “musyawarah untuk mencapai kata mufakat” benar-benar bisa terjadi di sini. Hal ini juga tergantung bagaimana Ketua RT memimpin proses rembug warga tersebut.

Dalam menjelaskan proses dilakukannya perencanaan penganggaran melalui rembug warga, Bapak Tanto menyertakan beberapa dokumen untuk memperjelas penjelasannya. Dokumen tersebut seperti daftar hadir warga yang mengikuti kegiatan tersebut sampai pada berita acara hasil rembug warga yang telah sah dan tertandatangani oleh beberapa perangkat yang berwenang. Beberapa arsip dokumen tersebut tersimpan rapi pada ruangan beliau. Gambaran yang lengkap telah didapatkan oleh peneliti melalui beliau.

Pendalaman makna dilakukan oleh peneliti untuk menemukan hakekat atau makna mendalam secara murni, biasanya tersirat dari keseluruhan makna yang sudah dihasilkan, baik dari Informan pertama yakni Pak Yono sebagai Ketua RT, maupun informan kedua yakni Bapak Tanto sebagai Ketua Tim Perencana dan menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di kelurahan “Harmoni”. Peneliti kemudian melakukan

perenungan sebagai upaya menangkap makna dari keseluruhan hasil penelitian. Perenungan tersebut menghasilkan reduksi transendental yang didasarkan tidak hanya pada pengucapan, pernyataan dari subjek saja, namun juga pada sikap, ekspresi, tekstur dan sinyal apapun yang ada yang dapat mendukung, melengkapi dan menjadikan bahan untuk direduksi dan ditemukan esensinya. Peneliti menemukan esensi dari fenomena partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran adalah sebuah “kepercayaan”. Sebuah kepercayaan yang tumbuh kembali di masyarakat disertai dengan harapan positif masyarakat terhadap pemerintah. *Trust* dan harapan positif dari masyarakat tumbuh melalui kegiatan rembug warga, karena ada kepastian akan pelaksanaan hasil rembug tersebut, serta melalui mekanisme yang berbeda dari yang ada sebelumnya.

Pekerjaan sebagai Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Anggaran

Setelah melalui tahapan perencanaan penganggaran, kemudian dilanjutkan penyusunan dan pengesahan APBD, pihak kelurahan segera mengajukan permohonan pencairan anggaran program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ini. Permohonan tersebut ditujukan kepada instansi terkait dengan keuangan daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) kota Kediri. Dalam susunan Tim Koordinasi Prodama tingkat Kota Kediri, yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, BPKA juga sebagai verifikator keuangan melalui Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Seksi Anggaran.

Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan, pencairan anggaran dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan dimana pada tiap tahapannya PPTK akan mencairkan anggaran untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) RT dari 10 (sepuluh) RT yang menjadi tanggung jawabnya (rata-rata setiap PPTK menghandle 10 RT). Sebelum proses pelaksanaan program atau kegiatan, terlebih dahulu para Ketua RT berkoordinasi dengan PPTK yang menjadi koordinator mereka. Koordinasi tersebut terkait waktu pelaksanaan, kesiapan pihak terkait, kesiapan bahan atau keperluan, dan sebagainya.

Noema pada bab ini adalah partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran. Dari pernyataan di atas proses *bracketing* pertama terhadap pernyataan Bapak Zen adalah pada kata “koordinasi”. Peneliti kemudian melakukan penggalian kesadaran secara lebih dalam lagi kepada beliau mengenai penjelasan dari *bracketing* awal tersebut. Sebagai PPTK, beliau memberikan penjelasan yakni sebuah bentuk “kerjasama”. Maksud dari “kerjasama” adalah untuk “mencari kekompakan” (sebagai *bracketing* baru) antara pihak satu dengan yang lainnya. Bahwa apapun yang terkait pelaksanaan program harus dikoordinasikan dengan intens dan jelas, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ditemukan noesis “kebersamaan antar warga dan perangkat”.

Selanjutnya diperoleh hasil reduksi eidetik tentang makna partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran, oleh Bapak Zen sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut: Bapak Zen secara sadar mengamini bahwa : pada proses pelaksanaan penganggaran harus dilakukan dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dengan aparat. “Sinergi masyarakat dengan aparat” penting untuk penyelesaian kegiatan dan pembagunan dengan cepat dan baik. Kesadaran ini terbentuk atas dasar pengalaman beliau mengkoordinir para Ketua RT dalam pelaksanaan penganggaran.

Peneliti kemudian melanjutkan penggalian makna partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran kepada informan ke 2 dalam tahap ini, yakni Bapak Purwanto yang juga sebagai Ketua RT. *Bracketing* pertama pada pernyataan Bapak Purwanto adalah pada kata “koordinasi” sebagai makna awal dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran berdasar pengalaman sebagai Ketua RT. Beliau menjelaskan bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak PPTK, maka sesuai jadwal akan mulai dilaksanakan pembangunan ataupun belanja modal.

Lebih dalam lagi beliau menjelaskan tentang “koordinasi”. Menurut beliau maksudnya adalah bagaimana antara Ketua RT dan PPTK dapat “mengkondisikan” (sebagai *bracketing* selanjutnya) agar semua berjalan lancar dan baik.

Dalam koordinasi tersebut, Ketua RT mengusahakan untuk memberikan “perhatian” kepada para warga. “Perhatian” ini adalah bagaimana Ketua RT berusaha para warganya mendapatkan upah yang layak ketika mereka

memberikan kontribusi. Lebih dalam lagi Bapak Purwanto menjelaskan tentang bagaimana warga “berkontribusi” terhadap lingkungan mereka bahwa antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan sangat tinggi. Kesepakatan warga bahkan ada yang atas nama pribadi untuk berkontribusi dalam pembangunan lingkungan menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah, (Sisk, 2002; Muluk, 2007; Sopanah, 2013).

Intentional Analysis dari kedua subjek atas makna partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran adalah sebuah “sinergi masyarakat dengan aparat” dalam penyelesaian kegiatan dan pembagunan dengan cepat dan baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran juga merupakan pemberian “kontribusi dari masyarakat yang layak mendapatkan apresiasi”.

Berdasar persepsi dari para informan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran terkandung makna yang tersirat berupa bagaimana para pelaksana program tersebut melaksanakan tugasnya, berpartisipasi, dengan menganggapnya sebagai sebuah “pekerjaan”. Bagi aparat, mereka memaknai pelaksanaan penganggaran sebagai bentuk pekerjaan untuk melaksanakan tugas yang telah diembannya, agar program dapat berjalan dengan baik. Bagi masyarakat, berpartisipasi dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai bentuk pekerjaan yang layak untuk mendapatkan apresiasi berupa honorarium atau upah.

Jaminan sebagai Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran

Pengawasan penganggaran dilakukan secara langsung oleh Tim Koordinasi. Tim ini terdiri atas Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK. Mereka dilibatkan secara aktif pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Prodama, terutama Ketua RT. Kedudukan mereka sangat vital yakni sebagai representasi masyarakat secara langsung. Pengendalian dan pemantauan dilakukan secara intens pada setiap pelaksanaan kegiatan, terutama oleh Ketua RT yang kemudian berkoordinasi dengan Ketua RW dan Ketua LPMK serta kepada perangkat kelurahan yang terkait. Selain hal tersebut di atas, sebagai tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi adalah melaksanakan sosialisasi tentang

pelaksanaan Prodamas dan membantu memberikan saran dan masukan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah mereka.

Setelah semua proses baik administrasi maupun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan selesai, maka selanjutnya hasil akhir dari pekerjaan tersebut diserahkan kepada masyarakat dengan mekanisme hibah. Hal ini dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Petunjuk teknis tentang hal ini tentu terdapat dalam Peraturan Walikota Kediri.

Ibu Yusa sebagai Ketua Tim Pengawas pada kelurahan “Harmoni” menjelaskan bahwa bentuk pengawasan Prodamas yang dia lakukan adalah dengan melakukan pengisian form lembar monitoring anggaran yang mereka buat sendiri sebagai inisiatif dan evaluasi atas tidak teraturnya proses keluar masuknya kas pada saat pelaksanaan berlangsung. Tidak mudah untuk dapat melakukan pengecekan dan mencari informasi terupdate, terutama terkait anggaran. Terdapat beberapa contoh form lembar monitoring anggaran.

Inovasi dalam penyiapan laporan keuangan, yang dapat digunakan dalam pengawasan ini mengamini saran dari Kloby (2009). Dia mengemukakan bahwa informasi tambahan dari model laporan keuangan yang terstandar mempengaruhi secara signifikan, apakah informasi tersebut dapat dikomunikasikan dengan warga. Hal ini terutama pada proses partisipasi masyarakat. Namun, bentuk laporan keuangan tidak selalu berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran, beliau menyarankan kepada peneliti untuk melakukan *epoche* kepada Bapak Budi Manan sebagai Ketua RT yang aktif dalam berkoordinasi dalam pengawasan baik kepada perangkat kelurahan maupun dengan Ketua RW dan Ketua LPMK.

Bracketing pertama dari pernyataan beliau tentang makna partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran adalah “memeriksa”. Pemeriksaan ini dilakukan beliau untuk dapat “mengetahui” secara rinci terutama pada berbagai laporan yang ada. Hal ini dilakukan dengan beliau datang ke kelurahan.

Jadi yang dilakukan Pak Budi adalah memeriksa secara teliti mulai dari dokumen perencanaan sampai pada dokumen pelaksanaan juga pada saat pelaksanaannya itu sendiri, beliau aktif berada di lapangan. Ketika belanja barang inventaris pun, beliau juga ikut mendampingi PPTK ketika berbelanja, juga mengetahui secara rinci spesifikasi barang dan harga barang tersebut, termasuk penambahan pajak dari harga toko. Selain hal tersebut, beliau juga berkoordinasi dengan Bu Sekretaris Kelurahan untuk mengetahui perincian pada lembar monitoring anggaran.

Lebih dalam lagi Bapak Budi menjelaskan bahwa maksud dari memeriksa dan mengetahui adalah untuk “mengevaluasi kesesuaian antara kondisi dilapangan dengan laporan” (*bracketing* baru) yang ada, juga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan. “Evaluasi” yang dilakukan itu juga bisa dipakai untuk bahan perencanaan program tahun depan.

Muara sekaligus *noesis* dari penjelasan proses evaluasi tadi adalah didapati sebuah bahan perencanaan program untuk tahun berikutnya. Karena data sudah lengkap, laporan sudah sesuai dengan kondisi dilapangan, kemudian pelaksanaan juga berjalan dengan baik dan tepat waktu, maka dapat menjadi dokumen awal sebagai bahan pada saat rebug warga di tahun berikutnya. Kemudian diperoleh hasil reduksi eidetik tentang makna partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran oleh Bapak Budi sebagai Ketua RT sebagai berikut: partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran sebagai “fungsi kontrol” atas pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik. Kesadaran ini terbentuk atas dasar pengalaman beliau dalam melakukan pengawasan, pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesainya program.

Esensi dari fenomena partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran adalah sebuah “jaminan” agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Segala aktivitas pengawasan yang dilakukan khususnya oleh Bapak Budi sebagai subjek pada tahapan ini, adalah semata-mata untuk mengetahui sejauhmana seluruh tahapan dalam program ini dapat berjalan dan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sebuah jaminan bahwa program dapat berjalan dengan baik, berhasil dan sesuai harapan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena partisipasi masyarakat dalam penganggaran di kota Kediri, melalui Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah “Bagaimana para pelaksana program tersebut memaknai partisipasi masyarakat dalam penganggaran?, Kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

Praktik partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran telah dimaknai secara sadar dan mendalam oleh narasumber sebagai bentuk “kepercayaan” dari masyarakat terhadap pemerintah. Kegiatan rebug warga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan dan harapan positif masyarakat terhadap pemerintah. Melalui keterlibatan mereka kedalam perencanaan penganggaran, mekanisme yang berbeda serta jaminan akan dilaksanakannya perencanaan tersebut, maka *trust* dari masyarakat akan tumbuh kembali kepada pemerintah. Peningkatan *trust* ini dibuktikan dengan adanya fenomena sebagian masyarakat yang tidak segan untuk berpartisipasi tidak hanya waktu, tenaga dan pikiran, namun juga ikut menyumbangkan uang atau materi secara sukarela.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran secara sadar dimaknai oleh para narasumber sebagai sebuah “pekerjaan”. Yakni masyarakat dan aparatur yang melaksanakan program dan kegiatan sebagai hasil dari perencanaan tersebut memaknainya sebagai sebuah pekerjaan, yang mana secara layak dan profesional harus mendapat upah atau penghargaan, sebagai hasilnya. Aparatur melaksanakan kegiatan tersebut sebagai wujud dari melaksanakan tugas, sedangkan masyarakat melaksanakannya sebagai pekerjaan secara profesional yang layak untuk mendapat apresiasi dari pemerintah.

Terakhir, berdasar pengalaman informan dalam praktik pengawasan anggaran, hal ini telah dimaknai secara sadar bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan penganggaran adalah sebuah “jaminan” agar program dapat berjalan dengan baik dan berhasil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Segala aktivitas yang dilakukan semata-mata adalah sebuah bentuk kontrol akan berjalannya sebuah program, aktivitas yang memastikan dan menjamin

bahwa program ini dapat berjalan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan yang menyertai penelitian ini, yakni: Objek penelitian yang hanya berada di satu lokasi pengamatan, yaitu kelurahan “Harmoni” yang menjadi kelurahan terbaik dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri. Hal yang terdeskripsikan dalam penelitian ini tentunya sebuah realitas yang terjadi di wilayah Kelurahan tersebut. Kebenaran dalam penelitian ini bersifat parsial, namun mendalam. Keterbatasan selanjutnya adalah tentang pemilihan informan, yang mana dalam penelitian ini pemilihan informan sangat dibantu oleh rekomendasi dari pihak instansi situs penelitian sebagai bahan pertimbangan.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam konteks yang serupa hendaknya: agar menggunakan sudut pandang dan metode yang berbeda, atau bila menggunakan metode sama, maka dibutuhkan strategi penelitian yang tidak terfokus pada satu kasus.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran mempunyai dampak yang tidak hanya positif, namun juga dampak negatif ataupun risiko yang pasti. Namun, risiko tersebut tentu harus dapat dikelola dan diminimalisasi sebaik mungkin. Evaluasi dan penyempurnaan program tetap harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Kediri demi mendapatkan hasil terbaik. Pengelolaan risiko juga harus lebih ditingkatkan lagi. Rekrutmen Pendamping Program harus benar-benar dijalankan berdasar hasil terbaik dan transparan sesuai kompetensi mereka. Sehingga diharapkan kendala, hambatan dan risiko dapat dikelola dan ditekan seminimal mungkin.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Suatu Pengantar*, ed.III Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bealman, V.D. 2013. *Certified Public Accountant Education and Ethical Decision Making Preparedness: A Phenomenological Study Exploring The Connection*. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education. Liberty University, Lynchburg, Virginia, USA.
- Beckett, J., dan King, C. 2002. The Challenge To Improve Citizen Participation In Public Budgeting : A discussion. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 14.3: hal.463-485.
- Bevans, S.B. 2002. *Models of Contextual Theology*. USA:

- Orbis Books.
- Burrell, G., dan Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Great Britain: Arena.
- Creswell, J. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ebdon, C. 2002. Beyond the Public Hearing: Citizen Participation in the Local Government Budget Process. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 14(2): hal. 273-94.
- Ebdon, C, dan Franklin, A. 2004. Searching for a Role for Citizens in the Budget Process. *Public Budgeting and Finance* 24 (1): hal. 32-49.
- Ebdon, C, dan Franklin, A. 2006. Citizen Participation in Budgeting Theory. *Public Administration Review* 66 (3): hal. 437–447.
- Edie, J. M. 1962. *What is Phenomenology?*. Chicago: Quadrangle Books, Inc.
- Herian, M.N. 2011. Local Budgeting and Public Participation : Contextual Predictors of State Laws Mandating Public Input. *State and Local Government Review 2011* 43:95. Sage Publications.
- Irianto, G., Novianti, N., dan Wulandari, P.P. 2014. “Kamuflase” dalam Praktik Rotasi Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5 (3): hal. 345-510.
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi : Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Paneleh.
- Kloby, K. 2009. Less Is More: Exploring Citizen-Based Financial Reporting in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(3): hal. 368-392. Boca Raton, USA: PrAcademics Press, Florida Atlantic University.
- Kuswarno, E. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ljungholm, D.P. 2015. Citizen Participation in Organizational Decision Making. *Review of Contemporary Philosophy*, 14: hal. 138-143. Woodside: Adleton Academic Publishers.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marlowe, J dan Portillo, S. 2006. Citizen Engagement in Local Budgeting: Does Diversity Pay Dividends?. *Public Performance and Management Review*, 30 (2): hal. 179-202.
- Miller, G.J. 2002. Budgeting Structures and Citizen Participation. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 14(2): hal. 233-272. Boca Raton, US: PrAcademics Press, Florida Atlantic University.
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi 4*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muluk, M.R.K., dan Wahyudi, S. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Lembaga Penerbitan & Dokumentasi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang.
- Petrie, M dan Shields, J. 2010. Producing a Citizens’ Guide to the Budget: Why, What and How. *OECD Journal on Budgeting*, 10(2): hal. 75-87. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
- Putra, F. 2012. *Governance Intelligence and Quotient. Sebuah Alat Ukur Kinerja Individu Kepala Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri. 2012. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014.
- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial – Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Schick, A. 2011. Repairing the Budget Contract between Citizen and the State. *OECD Journal on Budgeting*, 11(3): hal. 1-27. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
- Sisk, T.D. 2002. *Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan. Seri 4*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Sopannah dan Wahyudi, I. 2005. Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat terhadap Pengawasan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kofa Malang. *Preseding Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran*, Surabaya 23-24 November 2005.
- Sopannah. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Preseding Simposium Nasional*

- akuntansi VI, Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan Kualitas Pengetahuan, Pendidikan dan Etika Bisnis, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Sopannah. 2007. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berprespektif Gender. *Preseding Konfrensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik I*, Pascasarja UPN V Jatim, Surabaya, 25-26 April 2007.
- Sopannah. 2008. Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kota Malang. *Junal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7 Edisi April. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sopannah. 2009. Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kofa Malang. *Preseding Konfrensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik II*, Balitbang Depdagri, Jakarta, Juni 2009.
- Sopannah. 2009. Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kofa Malang. *Preseding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12* Tanggal 4-6 November 2009 di Palembang.
- Sopannah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal (Studi pada Masyarakat Suku Tengger Bromo Jawa Timur)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Sopannah. 2014. "Kearifan Lokal" dalam Pusaran Modernitas (Studi Kasus : Partisipasi Masyarakat Suku Tengger dalam Proses Penganggaran). *Pidato Ilmiah Rapat Terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam Rangka Wisuda Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Semester Gasal 2013/2014 dan Dies Natalis ke 29 Universitas Widyagama Malang*, 29 Maret 2014.
- Theodoru, P. 2015. *Husserl and Heidegger on Reduction, Primordiality and the Categorical*, Contributions to Phenomenology. Switzerland: Springer International Publishing.
- Triyuwono, I. 2006. Akuntansi Syariah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah* di Gedung PPI Universitas Brawijaya 2 September 2006.
- Triyuwono, I. 2009. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, I. 2013. Makrifat Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi ke-16* Manado tanggal 25-27 September 2013.
- Walikota Kediri. 2014. Peraturan Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014. Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
- Walikota Kediri. 2014. Peraturan Walikota Kediri No. 52 Tahun 2014. Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
- Yanuarisa, Y., Rosidi., dan Irianto, G. 2012. Fenomenologi Transendental dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12 (2), Juni 2014
- Zahafi, D. 2003. *Husserl's Phenomenology*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Zhang, Y., Yang, K. 2009. Citizen Participation in the Budget Process : The Effect Of City Managers. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 21 (2) Summer 2009: hal. 289-317.